No. 33/Renja/DKP/2021

RENCANA KERJA DKP ACEH

2022

www.dkp.acehprov.go.id | 0651 22951 |
dkp@acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan hidayahNya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat menyelesaikan penyusunan ***"Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022"***, teriring salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.

Perencanaan kerja tahunan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dan pembuatan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif secara maksimal. Perencanaan kerja tahunan merupakan arahan kepada organisasi untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki program pembangunan yaitu Perencanaan Kerja Tahunan yang merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pelaksanaan pembangunan disektor kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan berbagai sektor perekonomian, yang telah memberikan kemajuan baik dari segi peningkatan produksi maupun produktivitas, kontribusi sumbangan devisa negara maupun penghasilan dari para pembudidaya ikan dan nelayan dapat dijadikan sumber pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, mengingat potensi dan peluang usaha, prospek serta keunggulan sektor perikanan dan kelautan masih dapat ditingkatkan dan digali lagi dengan melalui diversifikasi dan inovasi teknologi.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan sektor Kelautan dan perikanan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah secara signifikan. Diharapkan melalui perencanaan kerja tahunan dengan mengembangkan langkah-langkah strategis dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Semoga perencanaan kerja tahunan ini dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022.

Banda Aceh, Juli 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

ALIMAN, S.Pi, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19750210 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I.PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan tujuan 3
1.4. Sistem Penyusunan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun lalu
dan Capaian Renstra Tahun 2017-2022 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah 25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah 47
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA 48
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 75

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 77
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 79

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 99
BAB V. PENUTUP 100

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh menyimpan potensi ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang sangat besar, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya (laut, payau dan tawar), pengolahan hasil perikanan dan juga pariwisata bahari**.** Luas daratan Provinsi Aceh sebesar 57.365,67 km2, sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 km2 yang terdiri dari 56.563 km2 berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km2 berupa perairan zona ekonomi ekslusif (ZEE), dengan panjang garis pantai mencapai 2.666,3 km**.** Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan yang akan memberikan kontribusi besar pada pembangunan Provinsi Aceh, apabila pemanfaatannya dilakukan secara optimal.

Persoalan mendasar kita, antara lain mayoritas kegiatan usaha ekonomi perikanan umumnya dikerjakan secara tradisional (khususnya perikanan budidaya tambak), belum menerapkan IPTEK dan manajemen yang profesional. Inilah yang menyebabkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan di Aceh masih berada di bawah garis kemiskinan dan juga produktivitas hasil budidaya (ikan, udang dan rumput laut) yang rendah.

Untuk dapat membangun sektor ekonomi dan unit bisnis kelautan yang berkelanjutan dalam praktiknya seyogianya menerapkan prinsip -prinsip seperti setiap usaha harus memenuhi skala ekonominya, menggunkan *integrated supply chain* management system berbasis inovasi, dan penguatan dan penguatan industri hulu dan hilir. Melakukan pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan, kerjasama sinergis antar sektor dan unit usaha, serta pembangunan kluster ekonomi kelautan.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan yang cermat dan berhasil guna, berupa informasi yang lengkap dan akurat. Dalam hal ini informasi dari masyarakat kelompok sasaran merupakan hal yang paling mendasar yang harus ditanggapi dan dipertimbangkan. Dengan demikian upaya pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelompok sasaran sebagai upaya untuk kepentingan mereka dan akan mendorong berkembangnya partisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan tersebut.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dimana Renja sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Aceh sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Aceh menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022.

Sehubungan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, sebagai salah satu instansi membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahunan berupa dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Rencana awal Renja SKPA tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan danPerikanan Tahun 2017-2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

14. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
16. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang berisikan Pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya GOOD GOVERNMENT;
20. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
23. Qanun Aceh No. 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 – 2022.
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
2. Menjabarkan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2022;

3. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022 adalah:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2022;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 Sistem Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2022 menggunakan sistematika yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistem Penulisan

BAB II :Hasil Evaluasi Renja Perangkat Aceh Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap RKPA

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran perangkat Aceh
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV :Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Aceh

BAB V :Penutup.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT ACEH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022

Rencana Kerja Dinas Kelauatan dan Perikanan Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelauatan dan Perikanan Aceh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program/kegiatan dan Pengukuran kinerja berdasarkan sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan Aceh selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Pengukuran kinerja program/kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran terhadap Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Tabel. 2.1. Produksi Perikanan Budidaya

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	108.045,79	107.309,23	99,32

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 107.309,24 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2020 yakni sebesar 108.045,79,24 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 99,32%. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 meningkat sebesar 5,38 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 101.529,57 ton dan kenaikan 7,24% dari tahun 2018. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang mencapai 42.239,06 ton, lele mencapai 19.598,21 ton, bandeng mencapai 16.101,71 ton, nila mencapai 13.590,24 ton, mas mencapai 9.096,21 ton, kerapu mencapai 2.415,24 ton, belanak mencapai 2.112,47 ton, patin mencapai 480,82 ton dan ikan lainnya mencapai 1.675 ton. Pertumbuhan perikanan budidaya

berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2020 dan tahun 2020-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan.

Belum tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perubahan cuaca yang masih ekstrem dan terjadi banjir setelah dilakukan penebaran benih di beberapa daerah sentra produksi.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok dan dengan adanya usaha pembinaan pakan mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi;
- meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul;
- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;
- Nilai ekonomis komoditas ikan yang cukup tinggi seperti ikan bandeng, nila, mas, kerapu, dan udang maka pemasarannya masih cukup terbuka.

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2020 adalah sebanyak 229.174,39 ton atau mencapai 101,67% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 214.350,1 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 97,00% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 222.899,15 ton dan sisanya sebesar 3,00% atau mencapai 6.275,24 ton berasal dari Perairan Umum Daratan (PUD).

Tabel. 2.2. Produksi Perikanan Tangkap

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	214.350,1	229.174,39	101,67

Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2020 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 110.869,15 ton, kakap mencapai

20.625,58 ton, kembung mencapai 8.821,34 ton, tenggiri mencapai 9.655,25 ton, selar mencapai 18.227,88 ton, rajungan dan kepiting mencapai 9.444,13 ton, lobster mencapai 4.475,94 ton dan komoditas lainnya mencapai 20.779,68 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 4.531,37 ton, udang 1.734,14 ton, dan jenis lainnya mencapai 9,73 ton. Pertumbuhan perikanan tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2020.

Peningkatan volume produksi perikanan tangkap, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi;
- bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelopok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut dalam, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal;
- Tindakan tegas terhadap kapal-kapal IUU fishing menyebabkan jalur migrasi ikan yang selama ini tertahan dapat diakses oleh nelayan lokal, sehingga menumbuhkan fishing ground baru atau peningkatan jumlah tangkapan di fishing ground yang lama; dan
- Sistem perijinan yang lebih mudah.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

Pada tahun 2020, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 2,9 juta USD atau telah mencapai 91,89% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 3,2 juta USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 4,4 juta USD, capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 32,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2022 pada dokumen Renstra DKP Aceh 2018-2022 yaitu sebesar 4,5 juta USD, realisasi tahun 2020 baru mencapai

65,61%. Dengan demikian diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target ekspor di tahun 2020.

Tabel. 2.3. Nilai Ekspor Perikanan.

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	1. Meningkatnya nilai ekspor perikanan (USD)	3.250.000	2.986.439	91,81

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 yaitu (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 1,5 juta USD (51,00%), udang dan kepiting mencapai 1,1 juta USD (40,08%), kerapu sebesar 208 ribu USD (6,98%), dan lobster sebesar 57 ribu USD (1,94%).

Salah satu penyebab tidak tercapainya nilai ekspor perikanan tahun 2020 dikarenakan terjadi penurunan produksi perikanan tangkap dari komoditas utama seperti ikan tuna dan cakalang, sehingga mempengaruhi volume ekspor hasil perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian nilai ekspor antara lain :

- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, rajungan dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;
- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk hasil perikanan;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan;
- Partisipasi aktif dalam pameran di pusat-pusat pasar produk hasil perikanan dalam maupun luar negeri;
- Pemberantasan illegal fishing sehingga nelayan lokal mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan.

d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Konsistensi dokumen perencanaan belum terpenuhi diakibatkan oleh belum tepatnya penyelesaian penyusunan program tepat waktu, seperti pengesahan dokumen anggaran yang melebihi waktu yang ditetapkan.

Tabel.2.4. Dokumen Perencanaan

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)	80	80	100,00

e. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel. 2.5. Jumlah Keluarga Miskin

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil (KK)	50	40	80

Pada tahun 2020, jumlah keluarga miskin dapat dikurangi dengan dilakukan pembinaan dan bantuan modal usaha. Sasaran keluarga yang dibina dan dibantu dari pelaku usaha garam yang tersebar di Kab. Aceh Besar, Aceh Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Aceh Timur. Selain itu, kelompok nelayan dan pembudidaya ikan di pulau simeulue dan palau banyak. Persentase outcome yang dicapai hanya 80%, penyebab tidak tercapainya outcome ini adalah terjadi Recofusing anggaran Karena Pandemi covid-19, sehingga kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat di realisasikan karena anggaran yang tersedia semuanya dialihkan untuk mengatasi pandemic covid-19.

f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tabel. 2.6. Luas Kawasan Konservasi

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	1. Luas Kawasan Konservasi	145.237,77	149.228,57	102,75

	Laut (Ha) 2. Persentase penyelesaian kasus IUU Fishing yang tepat Waktu (%)	100	100	100

Target luas kawasan konservasi pada tahun 2020 sejumlah 145.237,77 ha dan target akhir renstra tahun 2022 adalah 281.100 ha, target luas kawasan konservasi mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan target tahun 2016 (68.442,81 ha) dan tahun 2017 (77.856,66 ha), dengan realisasi sebesar 149.228,57 ha atau sebesar 102,75% dari target di tahun 2018. Sedangkan Indikator persentase penyelesaian kasus pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perijinan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan. Pada tahun 2020 telah mencapai target, yakni realisasinya mencapai 100% dari target sebesar 100% atau dari kasus yang ditemukan sebanyak 2 kasus dan dapat diselesaikan keduanya oleh tim pengawasan perikanan DKP Aceh.

Pada tahun 2020 terdapat kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang termasuk golongan ringan yaitu berupa pelanggaran administrasi. Dari kasus tersebut, Sebanyak 2 kasus yang direkomendasikan untuk diberikan pembinaan/sanksi administrasi. Hal ini, dikarekan bentuk pelanggaran yang dilakukan berupa tidak memiliki dokumen kapal lengkap sesuai dengan ketentuan kelayakan berlayar terutama dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Kegiatan pendukung utama yang telah dilakukan meliputi: (1) pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan, (2) monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di WPP 571 dan WPP 572.

Dampak dengan bebasnya perairan aceh dari kegiatan Illegal Fishing dapat dilihat dengan terus meningkatnya produksi perikanan tangkap dan meningkatnya nilai ekspor perikanan yang produksinya disumbangkan oleh produk perikanan tangkap.

Untuk lebih jelas hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan dapat dilihat pada table T-C.29 berikut:

Tabel T-C 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) (%)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**25**	**01**	**1,01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)**	**100,00**	**12,00**	**12,00**	**6,00**	**50,00**	**12,00**	**30,00**	**250,00**
3	25	01	1,01	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	60,00
3	**25**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan**	**Meningkatnya Kinerja ASN (orang)**	**227,00**	**227,00**	**227,00**	**227,00**	**100,00**	**227,00**	**227,00**	**41,66**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	12,00	100,00
3	25	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tambahan penghasilan ASN (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	5,00	41,67
3	**25**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**41,66**	**41,66**	**100,00**	**241,66**	**241,66**
3	25	01	1,06	01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67
3	25	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67
3	25	01	1,06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67
3	**25**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**5,00**	**41,67**	**12,00**	**29,00**	**241,67**
3	25	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67
3	25	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67
3	25	01	1,08	03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67
3	25	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	**25**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah (bulan)**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**5,00**	**41,67**	**12,00**	**29,00**	**241,67**
3	25	01	1,09	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit) 'tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67
3	25	01	1,09	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	12,00	12,00	5,00	41,67	12,00	29,00	241,67
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau- pulau kecil (KK)**	**400,00**	**153,00**	**250,00**	**168,00**	**67,20**	**250,00**	**168,00**	**67,20**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	**25**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Terkelolanya ruang laut Aceh sampai dengan 12 mil (%)**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**37,65**	**37,65**	**100,00**	**187,65**	**187,65**
3	25	02	1,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	5,00	1,00	1,00		0,00	1,00	2,00	200,00
3	25	02	1,01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi yang dikelola (ha)	281.200,00	161.772,35	280.500,00		0,00	280.500,00		0,00
3	25	02	1,01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhab (lokasi)	10,00	2,00	2,00	6,00	300,00	2,00	10,00	100,00
3	25	02	1,01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang tanggap bencana (orang)	400,00	19,00	200,00	238,00	119,00	200,00	457,00	114,25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	**25**	**02**	**1,03**		**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**	**Meningkatnya keterampilan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**	**600,00**	**80,00**	**250,00**	**188,00**	**75,20**	**250,00**	**518,00**	**86,33**
3	25	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah petani garam yang dibina, dibantu sarana dan prasarananya (orang)	600,00	33,00	250,00	205,00	82,00	250,00	488,00	**81,33**
3	25	02	1,03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau- pulau kecil (kk)	600,00	80,00	250,00	188,00	75,20	250,00	518,00	86,33
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**238.568,00**	**211.266,13**	**222.959,00**	**211.266,13**	**94,76**	**231.568,00**	**216.266 ,13**	**90,65**
3	**25**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**238.568**	**211.266**	**222959,00**	**211.266**	**94,76**	**231.568**	**216.266**	**90,65**
3	25	03	1,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data penangkapan ikan laut (dokumen)	5,00	1,00	1,00	3,00	300,00	1,00	5,00	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	03	1,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibantu (unit)	150	50	50	20	40,00	50	120	80,00
3	**25**	**03**	**1,02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**238.568,00**	**211.266**	**222.959**	**211.266**	**94,76**	**231.568**	**216.266**	**90,65**
3	25	03	1,02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen produksi perikanan tangkap di PUD (dokumen)	6,00	1,00	1,00	3,00	300,00	1,00	5,00	83,33
3	25	03	1,02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana yang dibangun (unit)	10,00	2,00	5,00	4,00	80,00	5,00	4,00	40,00
3	25	03	1,02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha yang dibantu (unit)	175,00	12,00	40,00	64,00	160,00	40,00	116,00	66,29

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	**25**	**03**	**1,03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**238.568,00**	**211.266**	**222.959**	**211.266**	**94,76**	**231.568**	**216.266**	**90,65**
3	25	03	1,03	01	Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah dokumen persetujuan yang dikeluarkan izinnya (dokumen)	-	-	**18**	-		**18**	-	**0,00**
3	**25**	**03**	**1,06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**238.568,00**	**211.266**	**222.959**	**211.266**	**94,76**	**231.568**	**216.266**	**90,65**
3	25	03	1,06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah penyiapan dokumen pembangunan pelabuhan perikanan (dokumen)	5,00							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	03	1,06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi)	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00
3	25	03	1,06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	12,00	12,00	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	58,33
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**143.682,00**	**108.382,33**	**128.470,00**	**108.382,33**	**84,36**	**138.682,00**	**108.382,33**	**75,43**
3	**25**	**04**	**1,05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**143.682,00**	**108.382,33**	**128.470,00**	**108.382,33**	**84,36**	**128.470,00**	**108.382,33**	**75,43**
3	25	04	1,05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan (dokumen)	5,00	1,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	40,00
3	25	04	1,05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Budidaya yang Dibantu (unit)	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu prasarananya (lokasi)	474,00	21,00	100,00	142,00	142,00	100,00	263,00	55,49
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu sarananya (lokasi)	474,00	21,00	100,00	142,00	142,00	100,00	263,00	55,49

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Luas Kawasan Konservasi Perairan**	**281.100**	**161.772,35**	**280.500,00**	**161.772,35**	**57,67**	**281100,00**	**161.772,35**	**57,55**
3	**25**	**05**	**1,01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	**Lestarinya Kawasan Konservasi Perairan Aceh**	**281.100**	**161.772,35**	**280.500,00**	**161.772,35**	**57,67**	**280.500,00**	**161.772,35**	**57,55**
3	25	05	1,01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah lokasi Destructive Fishing yang terawasi (lokasi)	18,00	4,00	6,00	14,00	233,33	6,00	24,00	133,33
3	**25**	**05**	**1,02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Lestarinya Kawasan Konservasi Perairan Aceh (ha)**	**281.100,00**	**161.772,35**	**280.500,00**	**161.772,35**	**57,67**	**281.100,00**	**161.772,35**	**57,55**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	05	1,02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah lokasi usaha perikanan tangkap di PUD yang diawasi (lokasi)	23,00	3,00	7,00	13,00	185,71	7,00	23,00	100,00
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Meningkatnya nilai ekspor perikanan (USD)**	**4.552.000**	**1.837.400**	**3.975.000**	**1.837.400**	**46,22**	**4.552.000**	**1.837.400**	**40,36**
3	**25**	**06**	**1,02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Meningkatnya usaha pengolahan hasil perikanan (unit)**	**50,00**	**2,00**	**10,00**	**14,00**	**140,00**	**10,00**	**26,00**	**52,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	06	1,02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah pantauan mutu dan keamanan hasil perikanan (sampel)	600,00	50,00	200,00	300,00	150,00	200,00	550,00	91,67
3	**25**	**06**	**1,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Terpenuhinya bahan baku perikanan di kabupaten/kota (lokasi)**	**23,00**	**5,00**	**23,00**	**23,00**	**100,00**	**23,00**	**23,00**	**100,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	06	1,03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah lokasi pendistribusian bahan baku perikanan (lokasi)	23,00	5,00	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian tingkat realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator pelayanan daerah secara umum pada tahun 2020 telah menunjukan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dari 5 Sasaran Strategis (SS) terdapat 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dari 7 indikator tersebut terdapat 3 yang capaiannya ≥ 100% (bernotifikasi hijau), yaitu Nilai Tukar Nelayan, konsumsi ikan, produksi perikanan. Untuk indikator kinerja utama yang tidak tercapai di tahun 2020 sebanyak 4 indikator antara lain : Nilai Tukar Pembudidaya ikan, produksi garam, nilai ekspor perikanan dan luas kawasan konservasi perairan. Namun demikian, jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa indikator kinerja utama Dinas yang mengalami kecenderungan positif/kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Analisis capaian kinerja DKP Aceh tiap Sasaran Strategis untuk setiap indikator kinerja utama untuk menjelaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan SKPA. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan

Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh, dalam kaitan ini DKP Aceh senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatannya. Pendapatan merupakan total pendapatan per orang nelayan/pembudidaya yang dari aktivitas penangkapan ikan atau budidaya yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja diperolah dalam 1 (satu) bulan.

Sasaran strategis meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, memiliki dua IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi).

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat

kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan.

Apabila dilihat dari capaiannya ditahun 2020, maka capaian Nilai Tukar di bawah angka 100 dan tidak mencapai target tahun 2020, sedangkan pembudidaya ikan masih di bawah angka 100 dan masih belum mencapai target tahun 2020, yang antara lain disebabkan harga pakan yang merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%) masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan masih perlu diberikan bantuan pemerintah atau stimulan ekonomi utamanya untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan jumlah produksi dengan harga jual yang menguntungkan atau meningkatkan efisiensi, yang pada ujungnya akan meningkatkan daya beli pembudidaya ikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

IKU 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh. Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebesar 101,87, tahun 2019 sebesar 101,90 dan tahun 2020 sebesar 97,48 atau mencapai 96,28% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2020 yaitu sebesar 101,25.

TABEL 3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTN TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-1		Nilai Tukar Nelayan (NTN)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2018-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
101,87	101,90	101,25	97,48	96,28	-1,41	106,00	91,96

Sumber : BPS Aceh, angka sementara

Pertumbuhan realisasi NTN selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1,41 persen dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 91,96 persen.

Selama tahun 2020, NTN mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2020 dengan nilai mencapai 101,25. Tren naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan mulai terjadinya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 94,90 yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama empat tahun terakhir (2017 s.d 2020) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,1%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3%, tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak signifikat sebesar 0,3%. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2022 sebesar 106, posisi capaian tahun 2020 sudah mencapai 91,96%.

GAMBAR 3.1. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PER BULAN SELAMA TAHUN 2017-2020

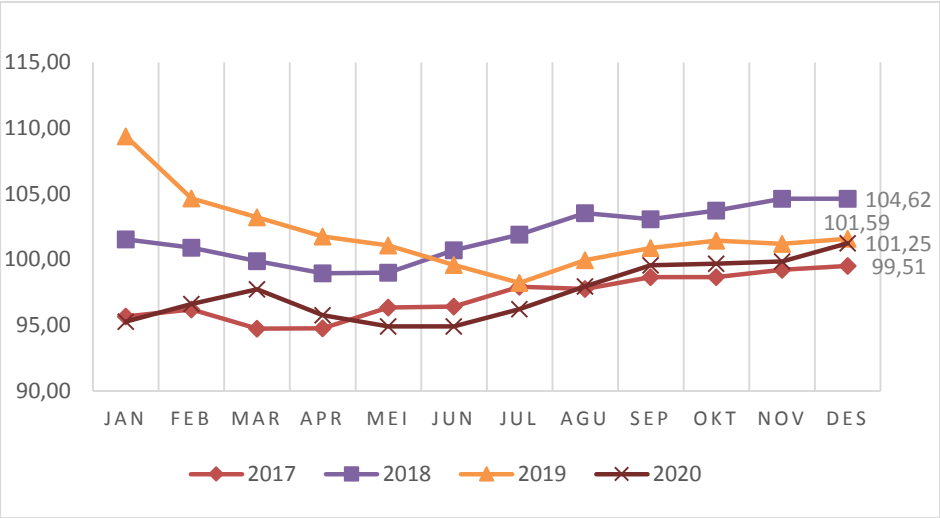

Penyebab tidak tercapainya target NTN tahun 2020 dikarekan efek pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan volume dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar.

Upaya yang telah dilakukan oleh DKP Aceh untuk meningkatkan NTN sebesar 106 pada tahun 2022 yaitu Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi seperti PPS Kutaraja, PPN Idi dan PPP Labuhan Haji. Selain itu, juga diberikan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan seperti rumpom laut dalam, jaring dan GPS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

IKU 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) merupakan alat ukur pendapatan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh.

TABEL 3.3. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTPi TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-2		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2019			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
92,96	92,99	99,50	95,24	95,72	2,36	103,00	92,46

Sumber : BPS Aceh, angka sementara

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2020 mencapai sebesar 95,24 atau sebesar 95,72 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 103, maka capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 92,46 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya 92,99 hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 2,25 persen. Belum tercapainya target NTPi tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 hampir sepanjang tahun yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan indeks bayar konsumsi rumah tangga meningkat. Selain itu, juga dipicu oleh peningkatan harga biaya produksi budidaya seperti pakan dan obat-obatan.Selama tahun 2020, NTPi mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Januari 2020 dengan nilai mencapai 99,73. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Juni 2020 yaitu sebesar 92,64. Nilai Tukar Pembudiaya Ikan (NTPi) selama tiga tahun terakhir (2018 s.d 2020) menunjukkan realisasi yang relatif meningkat dengan tren sebagai berikut dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,02%, dan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,25%.Penyebab kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah pakan mandiri, bioflok, bantuan benih dan induk unggul, bantuan prasarana dan

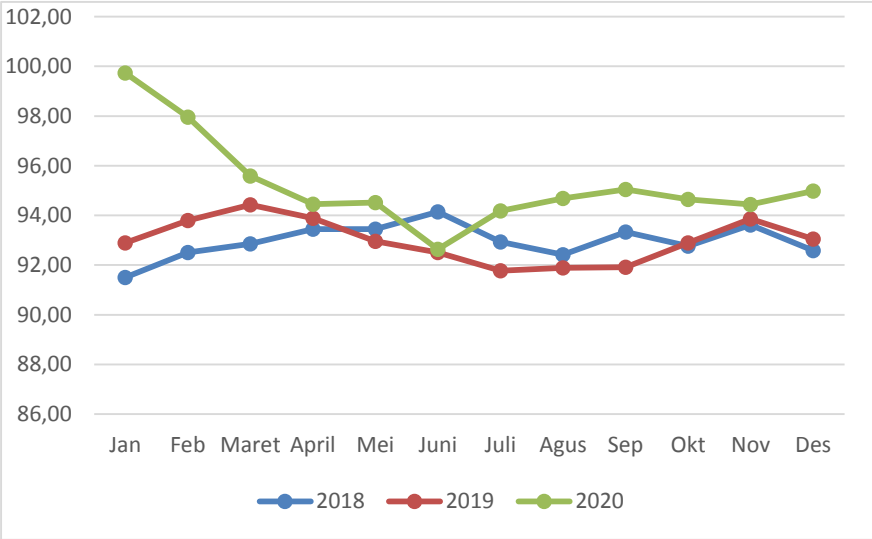

kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya. Kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah harga pakan yang cukup tinggi sementara pakan merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%). Selain itu, naiknya harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari semakin melemahnya nilai rupiah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTP.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan terus berupaya meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat afirmatif dan pemberian bantuan pemerintah sebagai salah satu stimulan bagi para pembudidaya serta memperluas akses permodalan bagi usaha budidaya diantaranya melalui (a) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan bahan baku, uji lab, penyediaan mesin pellet, dan pembinaan ke pembudidaya dan memperbanyak percontohan untuk budidaya pakan mandiri seperti cacing darah, cacing sutra yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (b) pengembangan teknologi bioflok untuk menekan Food Convertion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya; dan (c) penyedian benih unggul.

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan

IKU 3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Meningkatnya produksi ikan Aceh telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi daerah. Presiden juga telah memerintahkan para Menteri untuk mengkampanyekan gemar makan ikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa dengan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). DKP Aceh dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada anak-anak dan ibu hamil dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Memastikan penyediaan bahan makanan yang mengandung protein ikan dapat dilihat jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan protein ikan. Dalam hal ini, DKP Aceh menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan dan makanan jadi), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, ikan kayu dll.

TABEL 3.4. CAPAIAN ANGKA KONSUMSI IKAN TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-2		Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Bahan Makanan Protein Ikan					
IKU-3		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
57,89	58,97	55,28	59,32	107,31	0,59	58,64	101,16

Sumber : BPS Aceh, 2020 (diolah DKP Aceh)

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2020 adalah 59,32 kg/kapita/tahun, atau naik 0,59% dibandingkan dengan capaian tahun 2019, yang besarnya 58,97 kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2020 telah memenuhi target sebesar 55,28 kg/kapita/tahun atau mencapai 107,31% dari target. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2018-2022, yang besarnya 58,64 kg/kapita/tahun, maka capaian tahun 2020 telah melampaui target yaitu 101,16% dari target akhir periode lima tahun. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Aceh dalam mengkonsumsi ikan. Selain menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa produksi perikanan diserap pasar dalam negeri dan industri perikanan bergerak. Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, juga dilakukan promosi peningkatan konsumsi ikan didalam Provinsi Aceh. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung meningkatkan konsumsi ikan di Aceh antara lain :

- Penguatan melalui kampanye meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi & manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan & usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga;
- Promosi melalui bazar produk perikanan setiap bulan dan lomba memasak menu ikan;
- Pengadaan peralatan sarana pengolahan bagi UPI dan pembangunan sentra kuliner di daerah potensial;
- Meningkatkan keanekaragaman produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
- Kegiatan Sistem Logitik Ikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/industri dengan mutu baik dan harga stabil.

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita daerah adalah :

- Di beberapa wilayah masih kebiasaan masyarakat untuk makan ikan yang rendah;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah;
- Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas;

- Diversifikasi produk hasil perikanan yang bisa memenuhi tuntutan konsumen masih belum berkembang.

C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh

IKU 4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDRB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDRB sub perikanan tahun 2020 adalah sebesar 5,25% atau meningkat 0,03% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2019 yang besarnya 5,22% dan kenaikan rata-rata per tahun 2018-2020 sebesar 8,27%. Realisasi pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 5,13% atau tercapai 102,34% dari target. Apabila dibandingkan dengan target renstra DKP Aceh tahun 2022 sebesar 5,32%, maka pencapaian baru mencapai 98,68%.

TABEL 3.5. CAPAIAN PERTUMBUHAN PDRB SUBSEKTOR PERIKANAN TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-4		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh					
IKU-1		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh					
REALISASI 2018	REALISASI 2019*	2020**			% KENAIKAN 2018-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
4,83	5,22	5,13	5,25	102,34	8,27	5,32	98,68

Sumber : BPS Aceh, 2020 (diolah DKP Aceh) Ket : * data sementara ** data sangat sementara

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB antara lain: (1) meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan bantuan agroinput benih ikan unggulan dan pakan, (2) meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan meningkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan, (3) meningkatkan promosi investasi dibidang kelautan dan perikanan dengan melakukan kerjasama dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh serta melakukan bisinis forum dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (4) Mendorong sinergi kebijakan dan program dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan usaha kelautan dan perikanan baik skala UMKM maupun skala menengah dan besar.

GAMBAR 3.6. TREND NILAI PDRB PERIKANAN ADHK TAHUN 2016-2020 (Rp. milyar)

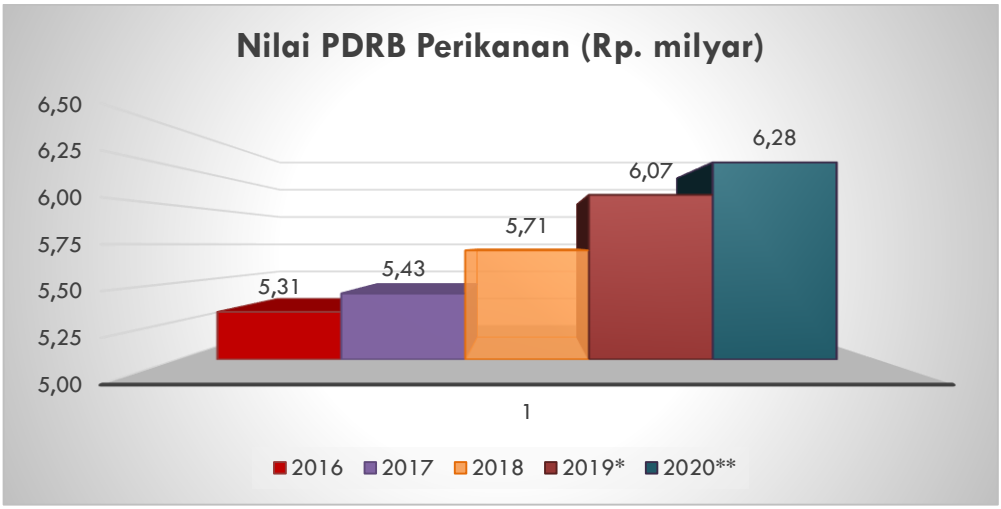

Ket : BPS Aceh 2020 (diolah DKP), * = Angka sementara, **= Angka sangat sementara

Apabila dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan atas dasar harga konstan (ADHK), maka terdapat peningkatan nilai yakni dari Rp.5,31 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 6,28 milyar pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penambahan investasi dan peningkatan penyaluran bantuan permodalan di masyarakat. Selain itu, Besarnya kontribusi sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

D. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan

IKU 5. Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

TABEL 3.6. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN 2019-2020

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan					
IKU-4		Produksi perikanan (ton)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI*	(%) CAPAIAN			
314.045,18	316.483,63	332.608,15	319.648,46	96,10	0,99	370.250,00	86,33

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh) Ket : * data sementara

Produksi perikanan tahun 2020 ditargetkan 332.608,15 ton, dan realisasinya sebesar 319.648,46 ton atau mencapai 96,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 316.483,63 ton, realisasi tahun 2020 telah mengalami pertumbuhan sebesar 0,99%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh tahun 2018-2022 yaitu sebesar 370.250 ton, realisasi tahun 2020 telah mencapai 86.33%.

GAMBAR 3.6. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN SELAMA TAHUN 2016-2020

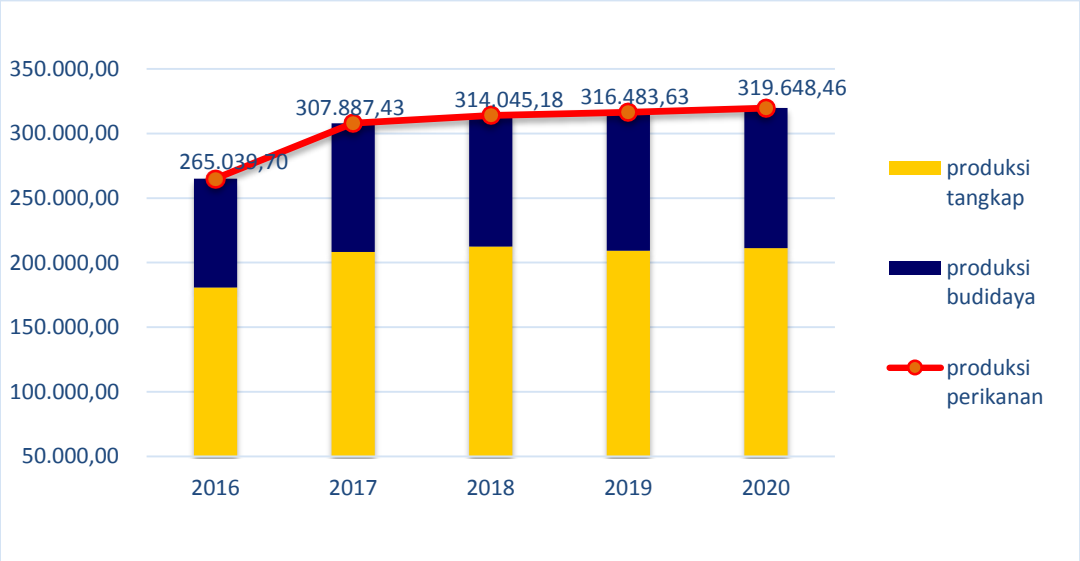

Realisasi produksi perikanan tersebut berasal dari produksi tangkap dan produksi budidaya. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan baik di perikanan tangkap maupun budidaya yang sudah dilakukan oleh DKP Aceh selama tahun 2020.

Produksi perikanan Aceh tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,99 persen dibandingkan tahun 2019, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap 66,09 persen dan produksi perikanan budidaya sebesar 33,91 persen.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2020 adalah sebanyak 211.266,13 ton atau mencapai 98,56% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 214.350,10 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 97,00% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 204.921,93 ton dan sisanya sebesar 3,00% atau 6.344,20 ton berasal dari tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD).

TABEL 3.7. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018-2020 (TON)

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2020
208.515,61	209.174,39	214.350,10	211.266,13	98,56	0,82	231.568,00	91,23

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata dari tahun 2018 s.d tahun 2020 dengan periode yang sama sebesar 0,82%, yaitu sebesar 208.515,61 ton pada tahun 2018 menjadi sebesar 211.266,13 ton pada tahun 2020. Kenaikan produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 0,98%. Sedangkan Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra 2018-2022 sebesar 231.568,00 ton maka telah tercapai sebesar 91,23%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut disebabkan oleh: (1) Nilai komoditas hasil penangkapan ikan di laut lebih tinggi dibandingkan di perairan umum; (2) Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan menyebabkan kualitas hasil tangkapan di laut lebih baik; (3) Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan; (4) Usaha penangkapan ikan di perairan umum bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar.

Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap adalah : Terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah, Cuaca seperti ombak dan angin masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan dan meningkatkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan, perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dibeberapa lokasi, kegiatan tersebut juga telah dapat tercatat dengan baik, bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelopok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut dalam, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal di 18 Kab./Kota yang telah disalurkan ditahun 2020, yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka peningkatkan produksi perikanan tangkap.

TABEL 3.8. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2016-2020 MENURUT KOMODITAS IKAN UTAMA (TON)

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
I	Perikanan tangkap	180.872,60	208.348,64	208.515,61	209.174,39	211.266,13	15,84
A	Perikanan Tangkap laut	176.376,91	202.316,13	202.125,48	202.899,15	204.921,93	15,24
1	Tuna/Cakalang/Tongkol	101.971,24	110.676,23	107.472,69	110.869,35	111.978,05	9,05
2	Kakap	17.427,61	20.588,42	20.855,87	20.625,58	21.391,61	19,26
3	Kembung	6.571,17	8.733,68	9.023,53	8.821,34	9.517,14	35,96
4	Tenggiri	7.329,88	9.589,74	9.674,84	9.655,25	9.751,80	31,77
5	Selar	15.690,05	18.712,50	19.838,41	18.227,88	19.655,76	19,12
6	Rajungan dan Kepiting	8.671,72	8.988,46	8.815,76	9.444,13	9.538,57	9,11
7	Lobster	4.482,31	4.481,53	4.790,61	4.475,94	4.520,70	0,56
8	Ikan Lainnya	14.232,93	20.545,57	21.653,77	20.779,68	18.568,30	43,05
B	Perikanan Tangkap PUD	4.495,69	6.032,51	6.390,13	6.275,24	6.344,20	38,59
1	Ikan	3.074,59	4.302,78	4.653,86	4.531,37	4.172,20	43,49
2	Udang	1.415,22	1.720,41	1.726,75	1.734,14	2.161,36	28,52
3	Lainnya	5,88	9,32	9,52	9,73	10,64	65,19

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh) Ket : * sangat sementara

Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2020 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 111.978,05 ton, kakap mencapai 21.391,61 ton, kembung mencapai 9.517,14 ton, tenggiri mencapai 9.751,80 ton, selar mencapai 19.655,76 ton, rajungan dan kepiting mencapai 9.538,57 ton, lobster mencapai 4.520,70 ton dan komoditas ikan lainnya mencapai 18.568,30 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 4.172,20 ton, udang 2.161,36 ton, dan jenis lainnya mencapai 10,64 ton. Pertumbuhan perikanan tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2020.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 108.382,33 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2020 yakni sebesar 118.258,05 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 91,65%. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 meningkat

sebesar 0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 107.309,24 ton dan kenaikan 6,32% dari tahun 2018.

TABEL 3.9. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2018-2020 (TON)

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2020
101.529,57	107.309,24	118.258,05	108.382,33	91,65	6,19	138.682,00	78,15

Keterangan : * Angka sementara

Jika dilihat selama periode 2018-2020, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut terus mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 6,19 persen per tahun dari 101.529,57 ton di tahun 2018 menjadi 108.382,33 ton di tahun 2020*). Sedangkan realisasi volume produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 108.382,33 ton atau mencapai 78,15% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2018-2022 yaitu sebesar 138.682 ton.

TABEL 3.10. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2016-2020 MENURUT KOMODITAS UTAMA (TON)

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
I	Perikanan Budidaya	84.167,10	99.538,79	101.529,57	107.309,24	108.382,33	26,21
1	Bandeng	13.978,58	14.320,20	14.446,90	16.101,71	16.262,73	15,03
2	Belanak	1.277,43	1.597,69	1.662,11	2.112,47	2.133,60	56,45
3	Mas	7.096,44	8.585,54	8.572,42	9.096,21	9.187,17	27,19
4	Lele	15.742,17	18.640,89	18.655,77	19.598,21	19.794,19	23,80
5	Patin	377,78	401,21	455,98	480,82	485,63	25,55
6	Nila	11.123,07	12.700,65	13.155,70	13.590,24	13.726,14	21,32
7	Kerapu	1.862,82	2.023,23	2.166,25	2.415,51	2.439,67	27,44
8	Udang	31.330,56	39.802,72	40.871,63	42.239,06	42.661,45	33,32
9	Ikan Lainnya	1.378,25	1.466,66	1.542,81	1.675,00	1.691,75	20,42

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh) Ket : * sangat sementara

Produksi perikanan budidaya tahun 2020 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang yang merupakan produksi tertinggi mencapai 42.661,45 ton, kemudian diikuti oleh ikan lele mencapai 19.794,19 ton, bandeng mencapai 16.262,73 ton, nila mencapai 13.726,14 ton, mas mencapai 9.187,17 ton, kerapu mencapai 2.439,67 ton, belanak mencapai 2.133,60 ton, patin mencapai 485,63 ton dan ikan lainnya mencapai 1.691,75 ton. Pertumbuhan Pertumbuhan perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 26,21%.

Belum tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perubahan cuaca yang masih ekstrem dan terjadi banjir di beberapa daerah sentra produksi dan pengaruh utama tidak tercapainya produksi karena wabah covid-19 yang menyebabkan banyak petani tambak menghentikan usahanya yang disebabkan meningkatnya harga bahan produksi yang beriringan dengan menurunnya harga jual hasil produksi sehingga banyak petani mengalami rugi.

Peningkatan volume produksi perikanan budidaya tahun 2020 secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan; (iv) Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda;
- meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul;
- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;
- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang dan bandeng. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya.

IKU 6. Produksi Garam

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam daerah sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam daerah karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pegaraman.

Produksi Garam merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang mendapat program PUGAR di 2 Kabupaten (Pidie Jaya dan Aceh Utara), produksi garam rakyat non PUGAR di 6 Kabupaten/Kota. Target produksi garam tahun 2020 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar adalah 25.542,32 ton, lebih besar dari target tahun 2019 sebesar 4.534 ton. Metodologi pendataan garam disusun oleh DKP sedangkan pengumpulan dan validasi Data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait.

TABEL 3.11. **CAPAIAN PRODUKSI GARAM TAHUN 2018-2020 (TON)**

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% PENINGKATAN 2019-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
17.721,50	17.773,68	25.542,32	19.187,58	75,12	7,96	43.166,52	44,45

Keterangan : * Angka sementara

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, produksi garam mencapai 19.187,58 ton. Target produksi garam pada tahun 2020 hanya tercapai sebesar 19.187,58 ton atau mencapai 75.12%. Realisasi produksi garam di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,96% apabila dibandingkan dengan produksi garam tahun 2019 yaitu sebesar 17.773,68 ton atau 7,96%. Apabila dibandingkan dengan target 2022 (Renstra DKP Aceh Tahun 2017-2022), realisasi tahun 2020 mencapai sebesar 44,45%. Diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target produksi sebesar 33.205,02 ton di tahun 2021. Penyebab tidak tercapainya produksi garam terhadap target tahun 2020 dikarenakan terjadinya musim hujan yang lebih panjang dan masih banyaknya petani garam berskala tradisional yang memproduksi garam dengan sistem perebusan. Berikut rincian distribusi jumlah produksi garam di kabupaten penghasil garam.

Target 25,542,32 ton sulit terpenuhi karena program ekstensifikasi lahan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain teknologi pergaraman yang telah dikembangkan belum mampu meningkatkan produksi garam secara signifikan. Jumlah produksi garam tahun 2020 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 karena musim panas yang lebih panjang.Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian produksi garam, yaitu melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam.

TABEL 3.12. PRODUKSI GARAM (TON) PER KABUPATEN SENTRA GARAM ACEH

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (TON)*	
		2019	2020
1	Aceh Selatan	19,45	15,97
2	Aceh Barat Daya	47,32	45,42
3	Aceh Besar	1.399,75	1.611,44
4	Pidie	7.814,00	8.256,45
5	Pidie Jaya	1.160,19	1.470,20
6	Bireuen	3.259,72	3.320,77
7	Aceh Utara	3.005,35	3.210,07
8	Aceh Timur	1.067,90	1.257,27
TOTAL PRODUKSI		17.773,68	19.187,58

Keterangan : * Angka sementara

Pada tahun 2020 produksi garam tertinggi terdapat pada Kabupaten Pidie sebesar 8.256,45 ton, kemudian diikuti Kabupaten Bireuen sebesar 3.320,77 ton, Aceh Utara sebesar 3.210,07 ton, Aceh Besar 1.611,44 ton, Pidie Jaya 1.470,20, Aceh Timur sebesar 1.257,27 ton, Aceh Barat Daya sebesar 45,42 ton dan Aceh Selatan sebesar 15,97 ton.

Meskipun produksi garam telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target produksi garam antara lain : 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca, teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi; 2) Program ekstensifikasi di delapan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik; 3) Lahan integrasi yang dilaksanakan di tahun 2020, beberapa daerah masih belum berproduksi hingga akhir musim sehingga proses rekonsiliasi/penataan lahan terlambat 4) Implementasi Manajemen Stok belum berjalan dengan baik.

Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBA agar produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan; peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing; ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan swasta (proses karena melibatkan instansi lainnya). Beberapa hal sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan produk garam antara lain Percepatan penyelesaian rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal, manajemen stok dengan melibatkan gudang-gudang rakyat yang telah mendapatkan SNI berkoordinasi dengan gudang garam nasional (GGN) yang telah ada dengan skema resi gudang, ekstensifikasi lahan dan perencanaan integrasi lahan dilakukan sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.

Capaian produksi garam tahun 2020 didukung oleh kegiatan :

- Integrasi lahan garam di 2 kabupaten melalui program bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR);
- Modernisasi produksi garam dari proses perebusan menjadi sistem rumah tunnel;
- Pengembangan usaha garam melalui pembinaan, revitalisasi lahan dan bantuan sarana produksi garam.

E. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan neraca perdagangan perikanan

Selama dua tahun yaitu tahun 2019-2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis meningkatkan neraca perdagangan perikanan yaitu dengan melihat tingkat ekspor perikanan Aceh. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai ekspor perikanan (USD).

IKU 7. Nilai Ekspor Perikanan (USD)

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar).

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

TABEL 3.13. CAPAIAN NILAI EKSPOR PERIKANAN ACEH TAHUN 2020

Sasaran Strategis-4		Meningkatkan neraca perdagangan perikanan				
IKU-7		Nilai ekspor perikanan (USD)				
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
4.408.162,00	2.986.439,00	1.357.000,00	1.837.400,00	135,40	4.552.000,00	40,36

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Pada tahun 2020, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 1,8 juta USD atau telah mencapai 135,4% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 1,3 juta USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 2,9 juta USD, capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 38,47%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2022 pada dokumen Renstra DKP Aceh 2017-2022 yaitu sebesar 4,5 juta USD, realisasi tahun 2020 baru mencapai 40,36%. Dengan demikian diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target ekspor di tahun 2021.

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 yaitu (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 0,9 juta (52,22%), udang dan kepiting mencapai 0,7 juta USD (40,04%), kerapu sebesar 0,1 juta USD (6,09%), dan lobster sebesar 30 ribu USD (1,65%).

Salah satu penyebab tidak tercapainya nilai ekspor perikanan tahun 2020 dikarenakan terjadi wabah covid-19, yang menyebabkan banyak terjadi penurunan harga dari komoditas utama seperti ikan tuna dan cakalang, sehingga mempengaruhi nilai ekspor perikanan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Negara pengimpor produk perikanan seperti singapura, china dan jepang semakin memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan non-IUU, sustainability dan tracebility;
- Beberapa produk perikanan Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang;
- Potensi diversifikasi tujuan pasar baru seperti Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin masih mengalami hambatan, mengingat Indonesia belum mempunyai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, lobster dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;

- Mendorong penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan dan supplier dan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk ekspor yang didukung dengan hasil riset dan pemantauan pasar;
- Percepatan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan.

F. Sasaran Strategis 5 : Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

Sasaran startegis ini memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yakni (i) Luas kawasan konservasi perairan (ha), (ii) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%), (iii) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%).

IKU 8. Luas Kawasan Konservasi Perairan Ekspor Perikanan

Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2020. Penghitungan target dilakukan dengan menjumlahkan total luas kawasan konservasi tahun sebelumnya dan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan tahun 2020. Realisasi luas kawasan konservasi sampai pada Tahun 2020 yaitu seluas 161.772,35 ha atau sebesar 57,78 % dari target 280.000 ha. Capaian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel 3.14.

TABEL 3.14. CAPAIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)

Sasaran Strategis-5		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-8		Luas kawasan konservasi perairan (ha)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			% Kenaikan 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
149.228,57	150.331,32	280.000,00	161.772,35	57,78	7,07	281.100,00	57,55

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Luas kawasan 161.772,35 ha tersebut terdiri dari 27 kawasan konservasi kewenangan pemerintah provinsi atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Rincian luas kawasan konservasi disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.15. LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Aceh Besar	8	29.615,21
2	Aceh Jaya*	2	43.398,43
3	Aceh Barat Daya	6	16.017,05
4	Aceh Selatan	5	3.590,34
5	Simeulue*	4	66.354,11
6	Aceh Tamiang	2	2.797,21

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Realisasi tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019: tahun 2020 berarti telah menambah kawasan konservasi seluas 11.441,03 hektar dari luas kawasan konservasi tahun 2019 yaitu 150.331,32 hektar, dan jika disandingkan dengan penambahan luasan pada tahun 2019 sebesar 1.102,75 hektar capaian luasan jauh lebih besar. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 pada Renstra DKP Aceh 2018-2022 sebesar 281.100 ha, maka capaian di tahun 2020 mencapai 57,55%.

Penyebab tidak tercapai target luas kawasan konservasi perairan karena terjadi perubahan anggaran pada tahun 2020 yang dialihkan untuk penanganan wabah covid-19 sehingga banyak calon kawasan konservasi tidak dapat ditetapkan. Selain itu, terdapat perubahan lokasi pencadangan kawasan sehingga mengurangi wilayah yang telah direncanakan pada awal tahun 2020.

Berdasarkan analisis di atas, maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2021, yaitu identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tamiang. Hasil identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.

Tantangan dalam pencapaian luas kawasan konservasi adalah pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi, dimana sebelum ditetapkan dan dikelola, sebuah kawasan konservasi harus disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Oleh karena itu, pendampingan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan zonasi dan rencana pengelolaan terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta mitra terkait.

Kegiatan pendukung pencapaian target 2020 adalah Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan luasan kawasan Konservasi perairan di Aceh mencapai target 281 ribu Ha.

2. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Proporsi tangkapan ikan yang berda dalam batasan biologis yang aman merupakan persentase tangkapan ikan yang masih aman di bawah angka Maximum Sustainable Yield (MSY) Aceh yaitu 272.707 ton.

TABEL 3.16. PROPORSI TANGKAPAN IKAN SELAMA 2017-2020 TERHADAP MSY (%)

TAHUN	2017	2018	2019	2020
Produksi Tangkap (ton)	208.349	208.516	209.174	211.266
% terhadap MSY Aceh	**76,40**	**76,46**	**76,70**	**77,47**

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Pada tahun 2020 jumlah tangkapan ikan aceh mencapai 211.266 ton atau 77,47% dari angka MSY Aceh, dengan jumlah produksi tersebut maka penangkapan ikan di laut Aceh masih dikategorikan aman, namun dilihat dalam tiga tahun terakhir proporsi tangkapan ikan mengalami peningkatan dari angka 76,40% pada tahun 2017 menjadi 77,47% pada tahun 2020.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menangani keberlangsungan ikan yang aman yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan bantuan penggantian alat tangkap, peningkatan kapasitas bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di 18 Kabupaten/Kota untuk mengawasi semua upaya yang merusak lingkungan laut, sehingga diharapkan dapat terjaganya kelestarian ikan di wilayah penangkapan Aceh (WPP 571 dan WPP 572). Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi dilakukan peningkatan produksi dari hasil budidaya payau, tawar maupun laut.

3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial adalah perbandingan antara luas kawasan yang dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif.

TABEL 3.17. CAPAIAN RASIO LUAS KAWASAN TERHADAP PERAIRAN TERITORIAL (%)

Sasaran Strategis-5		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-9		Rasio Luas kawasan terhadap perairan teritorial (%)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			% Kenaikan 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
2,64	2,66	4,95	2,86	57,78	7,07	4,97	57,55

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio kawasan lindung perairan Aceh mencapai 2,86% atau 161.772,35 ha dari total luas teritorial Aceh sebesar 5.656.300 Ha dan belum melampaui terget tahun 2020 sebesar 4,95% atau 57,78%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, luas kawasan konservasi perairan meningkat sebesar 11.441,03 ha atau sebesar 7,07%.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi antara lain percepatan penyusunan SK Gubernur Aceh tentang penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan Aceh, melakukan sosialisasi kawasan konservasi bagi masyarakat perikanan dan penanaman mangrove dikawasan konservasi bentuk wujud dari rehabilitasi kawasan konservasi.

Selain itu, tingkat realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator pelayanan daerah dapat dilihat pada tabel T-C 30 berikut.

Tabel T-C 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh)

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021*	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produksi Perikanan (ton)			332.608,15	351.429,39	370.250,00	370.250,00	336.483,63	64.401,70	370.250,00	370.250,00	
a	Perikanan tangkap (ton)			214.350,10	222.959,09	231.568,00	231.568,00	229.174,39	49.636,76	231.568,00	233.637,00	
b	Perikanan budidaya (ton)			118.258,05	128.470,30	138.682,00	138.682,00	107.309,24	14.764,93	138.682,00	139.682,00	
2	Garam (ton)			25.542,32	33.205,02	43.166,52	25.166,52	14.591,00	-	43.166,52	25.166,52	
3	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)			55,28	56,96	58,64	60,64	58,97	-	58,64	60,64	
4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)			77,01	80,67	84,34	84,34	76,70	-	84,34	84,34	
5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)			4,95	4,96	4,97	4,97	2,66	-	4,97	4,97	
6	Luasan kawasan konservasi (ha)			280.000,00	280.500,00	281.100,00	281.100,00	150.331,32	-	281.100,00	281.100,00	
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			101,25	103,00	106,00	102,00	101,90	94,91	106,00	102,00	

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021*	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)			99,50	101,00	103,00	100,00	92,99	94,18	103,00	100,00	
9	Nilai Ekspor Perikanan (US$)			1.468.730,00	1.475.000,00	1.552.000	2.550.000,00	2.986.439,00	222.196,00	1.552.000	2.550.000,00	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi program dengan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melakukan serangkaian pertemuan terkait dengan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, seperti singkronisasi program/kegiatan, pertemuan monev dan pelaporan APBA sumber dana otsus dan migas dan pertemuan validasi data indeks kriteria teknis Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan bentuk koordinasi dan sinergi program dengan Kementerian/Lembaga yaitu mengikuti proses penyusunan anggaran untuk setiap program/kegiatan yang bersumber dari dana APBN yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah antara lain :

a. Sumberdaya Manusia yang masih terbatas;
b. Sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti armada perikanan, alat tangkap dan pengelolaan sumberdaya ikan yang masih kurang sehingga membatasi kegiatan perikanan tangkap; serta sarana prasarana pelabuhan yang belum optimal;
c. Sarana pendukung dan infrastruktur perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum tersedia secara optimal;
d. Belum optimalnya kebijakan dalam pemanfaatan potensi budidaya laut;
e. Pengolahan dan produksi hasil perikanan belum berjalan dengan baik;
f. Belum terselesaikannya dokumen RZWP3K, RSWP3K, dan RPWP3K, dan RAPW3K;
g. Belum terpusatnya/focus perencanaan program jasa pada bidang kelautan dan perikanan;
h. Pemberdayaan masyarakat pesisir belum optimal;
i. Belum optimalnya pembinaan tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan;

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah:

a. Provinsi Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat pulau Sumatera yang dikelilingi oleh lautan yaitu Samudera Hindia di wilayah barat-selatan Aceh, serta Selat Malaka dan Perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh. Panjang pantai Aceh mencapai 2.666,27 Km danluas perairan laut Aceh mencapai 295.370 km2. Meninjau luasnya wilayah perairan laut Aceh, maka diprediksikan bahwa masih luas wilayah perairan yang belum tereksploitasi sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh masih besar.
b. Sejumlah besar aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki pendidikan yang berkompetensi sehingga mampu mencari solusi dari segala permasalahan dalam upaya mensejahterakan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
c. Masyarakat mulai memahami bahwa sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bahagian terpenting dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.
d. Aceh memiliki Lembaga Adat Laot yang berperan dalam pengawasan sumber daya kelautan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Berbagai kearifan lokal yang dihasilkan oleh lembaga ini

juga mendukung kegiatan konservasi sumber daya laut yang mengarah kepada kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

e. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang) dan penurunan produktivitas perairan serta masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fisihing).
f. Masih tingginya ketergantungan pada input dari luar yang membuat pelaku usaha perikanan khususnya pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produk yang datangkan dari luar seperti penyediaan pakan dan sarana produksi lainnya.
g. Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan sektor Kelautan dan perikanan adalah :

a. Kemauan masyarakat untuk belajar mulai tumbuh;
b. Minat masyarakat untuk memahami teknologi sangat tinggi;
c. Kerjasama masyarakat dalam mengawasi sumber daya kelautan terbuka lebar dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas;
d. Peluang Usaha budidaya laut dan budidaya payau serta budidaya air tawar terbuka lebar;
e. Unit pembenihan rakyat mulai diminati masyarakat;
f. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik serta sertifikasi tambak;
g. Dukungan terhadap pengelolaan bersama sudah mulai terbentuk dalam masyarakat terutama nelayan dan petambak;
h. Mulai memahami pentingnya informasi pasar dalam menentukan harga jual;
i. Tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan;

Terdapatnya Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang bergerak dalam pelayanan sektor perikanan.

2.4. Review Terhadap RKPA

Tahun 2021 merupakan tahun keempat jabatan Gubernur Aceh periode 2017 – 2022. Pembangunan di Aceh pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen awal RPJMA yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang telah direview, memiliki 6 program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Review terhadap Rencana Awal RKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2021 antara Rencana Awal RKPA dengan Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Program/Kegiatan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari RKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2021 terdapat besaran anggaran sesuai dengan

jumlah pagu indikatif rencana awal RKPA adalah sebesar Rp. 190.222.014.878.-. Setelah dilakukan Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif sehingga anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 158.506.000.000.- yang tersebar pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 37.470.200.000,-, program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp. 1.500.000.000,-, program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 74.730.800.000,-, program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebanyak Rp. 43.155.000.000,-, Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 350.000.000,-, dan pada Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 1.300.000.000,-,. Penjelasan hasil analisis besaran pagu indikatif tahun 2022 pada masing-masing kegiatan sebagai dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan.

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan
      Kegiatan Administrasi Keuangan merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 32.432.905.106-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 2.500.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.578.590.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      - penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 2.056.204.894-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.050.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.

b. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kegiatan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.150.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil merupakan kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 4.830.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

   Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi merupakan kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

   - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.

c. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

   Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi merupakan kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 69.850.800.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
   - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

   a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

      Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut merupakan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 43.155.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

      - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut;
      - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
      - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

   a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

      Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil merupakan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

      - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil;
      - Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil.

   b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

   Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar merupakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.000.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

   - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing.

b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

   Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi merupakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

   - Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31. Review Terhadap Awal RKPA Tahun 2022

SKPA : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				190.222.014.878					206.586.528.000	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi	100,00	57.567.119.290	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi	100,00	40.949.790.161	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							dengan Total Laporan Wajib) (%)					**dengan Total Laporan Wajib) (%)**			
3	**25**	**01**	**1,01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)**	**12,00**	**2.250.000.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)**	**12,00**	**390.888.000**	
3	25	01	1,01	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Jumlah dokumen Perencanaan	5,00	2.250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Jumlah dokumen Perencanaan	10,00	390.888.000	
3	**25**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan**		**Meningkatnya Kinerja ASN (orang)**	**227,00**	**34.061.925.106**	**Administrasi Keuangan**		**Meningkatnya Kinerja ASN (orang)**	**227,00**	**35.870.624.186**	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	29.432.905.106	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	32.870.624.186	
3	25	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya tambahan penghasilan ASN (bulan)	12,00	4.629.020.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya tambahan penghasilan ASN (bulan)	12,00	3.000.000.000	
3	**25**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)	**100,00**	-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)**	**100,00**	**2.500.000**	
3	25	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (orang)	5,00	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (orang)	5,00	2.500.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	**25**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)**	**100,00**	**1.663.600.493**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)**	**100,00**	**1.656.573.081**	
3	25	01	1,06	01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12,00	85.513.050	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12,00	45.000.000	
3	25	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	12,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	12,00	484.573.081	
3	25	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	713.237.443	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	400.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	01	1,06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12,00	364.850.000	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12,00	200.000.000	
3	25	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	527.000.000	
3	**25**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)**	**12,00**	**6.610.233.068**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)**	**12,00**	**1.979.204.894**	
3	25	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	12,00	16.650.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	12,00	15.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	3.089.552.848	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	622.000.000	
3	25	01	1,08	03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	2.239.213.468	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	266.204.894	
3	25	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	1.264.816.752	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	1.076.000.000	
3	**25**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya barang milik daerah (bulan)**	**12,00**	**12.981.360.623**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya barang milik daerah (bulan)**	**12,00**	**1.050.000.000**	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	01	1,09	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit) 'tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)	12,00	1.411.360.623	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit) 'tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)	12,00	850.000.000	
3	25	01	1,09	18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	11.570.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	200.000.000	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU**		**Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil (KK)**	**300,00**	**8.644.912.082**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-**		**Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau- pulau kecil (KK)**	**300,00**	**2.970.937.400**	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					KECIL					**PULAU KECIL**					
3	**25**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**		**Terkelolanya ruang laut Aceh sampai dengan 12 mil (%)**	**100,00**	**1.827.857.635**	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**		**Terkelolanya ruang laut Aceh sampai dengan 12 mil (%)**	**100,00**	**1.539.691.400**	
3	25	02	1,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	1,00	1.000.167.691	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	1	150.000.000	
3	25	02	1,01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhab (lokasi)	6,00	827.689.944	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhab (lokasi)	6	1.389.691.400	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	**25**	**02**	**1,03**		**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**		**Meningkatnya keterampilan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**	**300,00**	**6.817.054.447**	**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**	**0**	**Meningkatnya keterampilan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**	**300**	**1.431.246.000**	
3	25	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah petani garam yang dibina, dibantu sarana dan prasarananya (orang)	200,00	2.363.444.447	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah petani garam yang dibina, dibantu sarana dan prasarananya (orang)	200	1.381.246.000	
3	25	02	1,03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau- pulau kecil (kk)	100,00	4.453.610.000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau- pulau kecil (kk)	100	50.000.000	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**	**231.568,00**	**90.972.184.719**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**231.568**	**80.279.254.908**	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							(ton)								
3	**25**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**231.568,00**	**5.408.951.257**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**231.568**	**11.520.000.000**	
3	25	03	1,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data penangkapan ikan laut (dokumen)	1,00	1.263.951.257	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data penangkapan ikan laut (dokumen)	1,00	50.000.000	
3	25	03	1,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi sarana yang dibantu (lokasi)	8,00		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi sarana yang dibantu (lokasi)	8,00	11.320.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	03	1,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibantu (unit)	20,00	4.145.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibantu (unit)	20,00	150.000.000	
3	**25**	**03**	**1,02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**231.568**	**819.309.574**	**Kegiatan pengadaan alat bantu operasional penangkapan ikan**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**231.568,00**	**50.000.000**	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	03	1,02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen produksi perikanan tangkap di PUD (dokumen)	1,00	819.309.574	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen produksi perikanan tangkap di PUD (dokumen)	1,00	50.000.000	
3	**25**	**03**	**1,06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**231.568,00**	**84.743.923.888**	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**231.568**	**68.709.254.908**	
3	25	03	1,06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi)	7,00	81.204.639.868	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi)	7,00	67.459.254.908	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	03	1,06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	7,00	3.539.284.020	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	7,00	1.250.000.000	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**138.682,00**	**23.236.900.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**138.682,00**	**80.736.545.531**	
3	**25**	**04**	**1,05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**138.682,00**	**23.236.900.000**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**138682,00**	**80.736.545.531**	
3	25	04	1,05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Aceh Besar, Kab. Simeulue	Jumlah Prasarana Budidaya yang Dibantu (unit)	2,00	6.956.372.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Aceh Besar, Kab. Simeulue	Jumlah Prasarana Budidaya yang Dibantu (unit)	2,00	200.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu prasarananya (lokasi)	30,00	6.956.372.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu prasarananya (lokasi)	30,00	71.726.054.030	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu sarananya (lokasi)	23,00	9.324.156.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu sarananya (lokasi)	23,00	8.810.491.501	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Luas Kawasan Konservasi Perairan**	**281.100,00**	**4.664.564.453**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN**		**Luas Kawasan Konservasi Perairan**	**281.100,00**	**350.000.000**	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										PERIKANAN					
3	**25**	**05**	**1,01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**		**Lestarinya Kawasan Konservasi Perairan Aceh**	**281.100,00**	**3.046.183.077**	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**		**Lestarinya Kawasan Konservasi Perairan Aceh**	**281.100,00**	**275.000.000**	
3	25	05	1,01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya patroli pengawasan perikanan tangkap (kali)	6,00	1.296.686.864	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya patroli pengawasan perikanan tangkap (kali)	6,00	200.000.000	
3	25	05	1,01	02	Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbina dan terevaluasinya POKMASWAS (Klp)	15,00	1.749.496.213	Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbina dan terevaluasinya POKMASWAS (Klp)	15,00	75.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	**25**	**05**	**1,02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**Lestarinya Kawasan Konservasi Perairan Aceh (ha)**	**281.100,00**	**1.618.381.376**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**Lestarinya Kawasan Konservasi Perairan Aceh (ha)**	**281.100,00**	**75.000.000**	
3	25	05	1,02	01	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi usaha perikanan tangkap di PUD yang diawasi (lokasi)	5,00	1.618.381.376	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi usaha perikanan tangkap di PUD yang diawasi (lokasi)	5,00	75.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Provinsi					(satu) Daerah Provinsi					
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Meningkatnya nilai ekspor perikanan (USD)	4.552.000,00	5.136.334.334	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0	Meningkatnya nilai ekspor perikanan (USD)	4.552.000	1.300.000.000	
3	25	06	1,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Meningkatnya usaha pengolahan hasil perikanan (unit)	10,00	2.064.414.706	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Meningkatnya usaha pengolahan hasil perikanan (unit)	10	1.000.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	25	06	1,02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya layananan, bimbingan dan pemantauan laboratorium PPMHP (bulan)	12,00	2.064.414.706	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya layananan, bimbingan dan pemantauan laboratorium PPMHP (bulan)	12	1.000.000.000	
3	**25**	**06**	**1,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/**		**Terpenuhinya bahan baku perikanan di kabupaten/kota (lokasi)**	**23,00**	**3.071.919.628**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/**		**Terpenuhinya bahan baku perikanan di kabupaten/kota (lokasi)**	**23**	**300.000.000**	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					**Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**					
3	25	06	1,03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi pendistribusian bahan baku perikanan (lokasi)	23,00	3.071.919.628	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi pendistribusian bahan baku perikanan (lokasi)	23	300.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem kepemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh didiskusikan dalam pembahasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten/Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan daerah. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu dilakukann penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada.

Pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah diakomodirkan pada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan skala prioritas berupa :

a. Penyediaan sarana dan prasarana Unit Perbenihan Rakyat (UPR) untuk menghasilkan benih unggul;
b. Penyediaan angroinput untuk masyarakat pembudidaya baik air tawar maupun air payau;
c. Revitalisasi klaster kolam, tambak, jembatan dan jalan produksi;
d. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan;

Untuk lebih jelas usulan-usulan masyarakat dapat dilihat pada table Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

SKPA : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)**	**231.568,00**	
A	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	231.568,00	
-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	A. Selatan, A. Barat Daya, Banda Aceh, Sabang, A. Besar, Pidie,	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibantu (unit)	75,00	
B	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	222.959,00	
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	A. Besar, A. Selatan	Jumlah prasarana yang dibangun (unit)	2,00	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**138.682,00**	
A	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	138.682,00	
-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Banda Aceh, Simeulue	Jumlah Prasarana Budidaya yang Dibantu (unit)	2,00	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	A. Selatan, Nagan Raya, A. Barat, A. Jaya, A. Besar, Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, A. Utara, A. Timur, Langsa, A. Tamiang, A. Tengah, Gayo Lues, A. Tenggara	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu prasarananya (lokasi)	63,00	
-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	A. Jaya, Lhokseumawe, A. Utara	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu sarananya (lokasi)	7,00	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terutama melaksanakan empat misi yaitu :

- "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
- "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
- "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
- "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

- "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan", dengan tujuan:
  - meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
  - menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
- "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional", dengan tujuan:
  - optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
- meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- optimalnya pengelolaan ruang laut.

3.1.1. Tujuan dan Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pembangunan nasional yang tekait dengan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu :

- Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan Perikanan
  Kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan Perikanan meningkat; Inovasi dan riset Kelautan Perikanan menguat.
- Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.

Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal; Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil Kelautan Perikanan menguat; Pengawasan pengelolaan SDKP menguat; Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat; Pengelolaan ruang laut optimal.

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan Perikanan.
  Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP
- Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Meningkat.

Sedangkan arah kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam periode 2020-2024 yaitu :

- Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
- Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan;
- Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan;
- Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait;
- Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan.

3.1.2. Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas DKP Aceh

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
  Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; Memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs ke-14 yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water); Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil; Industrialisasi; Penguatan riset dan inovasi.
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
  Penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 571 dan WPP 572 dan Pada tahun 2020 terdapat 1 SKPT yaitu Sabang.
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan; Percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
  Perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
  Konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir; Perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
  Penguatan keamanan laut yaitu Pembangunan dan operasional armada PSDKP.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran adalah tahapan untuk Perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dan Utama dalam Perencanaan Pembangunan berupa Rencana Kerja Program/Kegiatan baik jangka menengah daerah maupun program/kegiatan setiap tahun berjalan terutama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh selama 1 (satu) tahun, yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata berupa peningkatan produksi dan produktivitas budidaya dan penangkapan serta meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya dan nelayan serta membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan melalui SKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, maka tujuan Rencana Kerja (Renja) dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

c. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi perikanan seperti pembangunan Balai Benih Ikan Pantai. Sehingga upaya tersebut mampu menyediakan benih unggul yang dapat disalurkan kepada masyarakat pembudidaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil budidaya ikan dapat dicapai.
d. Meningkatkan mutu hasil produksi perikanan serta pengembangan pemasaran hasil produk olahan hasil perikanan unggulan daerah melalui promosi di tingkat Daerah, Nasional dan Luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
e. Menumbuhkembangkan dan memantapkan sentra-sentra budidaya perikanan dan penangkapan sehingga membentuk kawasan klaster komoditas unggulan berbasis kemukiman dan lhok.
f. Meningkatkan penerapan teknologi kelautan dan perikanan tepat guna dalam rangka peningkatan infrastruktur dan modernisasi.

g. Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai.
h. Peningkatan kawasan konservasi perairan, Perlindungan dan dan pelestarian keanekaragaman hayati melalui penetapan kawasan RZWP3K.
i. Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil, dengan langkah operasional yang akan dilakukan adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.
j. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan 3 tujuan dari Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yaitu :

a. Menurunnya angka kemiskinan;
b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui sektor kelautan dan perikanan;
c. Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari;

Sedangkan sasaran perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan adalah :

a. Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan;
   Indikator Kinerja Utama :
   1. Nilai tukar nelayan (NTN);
   2. Nilai tukar petani ikan (NTPi)
b. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan
   Indikator Kinerja Utama :
   1. Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)
c. Meningkatkan pembangunan sektor perikanan;
   Indikator Kinerja Utama :
   1. Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)
   2. Produksi Perikanan (ton)
      - Produksi Perikanan Tangkap (ton)
      - Produksi Perikanan Budidaya (ton)
   3. Produksi Garam (ton)
d. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan;
   Indikator Kinerja Utama :
   1. Nilai Ekspor Perikanan (US$)
e. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir;
   Indikator Kinerja Utama :
   1. Luas kawasan konservasi perairan (ha)
   2. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)
   3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)

Adapun target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Target Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator	Target Capaian Tahun 2022
1	Produksi perikanan (Ton)	370.250
	- Perikanan Tangkap (Ton)	231.568
	- Perikanan Budidaya (Ton)	138.682
2	Produksi Garam (Ton)	43.166,52
3	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	58,64
4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	84,34
5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	4,97
6	Luasan kawasan konservasi (ha)	281.100,00
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106
8	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	1.552.000
9	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	103

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi pemerintah Aceh yaitu Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah yang Bersih, Adil dan Melayani" serta salah satu misi pemerintah Aceh yaitu "Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan" maka Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk mendukung visi misi tersebut dilaksanakan melalui 6 program, 16 kegiatan dan 33 subkegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tersebar pada 23 Kabupaten/kota di Aceh.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan Perkiraan Maju Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017 – 2022. Program Spesifik SKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta penyesuaian sebagaimana yang tercantum dalam RPJMA dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Program pengelolaan perikanan tangkap
4. Program pengelolaan perikanan budidaya
5. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 390.888.000,-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan.

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan
      Kegiatan Administrasi Keuangan merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 35.870.624.186,-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 2.500.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.656.573.081,-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      - penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.979.204.894-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
      - penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.050.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
   a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
      Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.539.691.400,-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
      - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
   b. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
      Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kegiatan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.431.246.000,-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
      - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
      Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil merupakan kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 11.520.000.000,-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
      - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
      - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
   b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
      Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi merupakan kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
      - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
   c. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi merupakan kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 68.709.254.908,-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

      Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut merupakan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 80.736.545.531,-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

      - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut;
      - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
      - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
   a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil

      Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil merupakan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

      - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil;
      - Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil.

   b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

      Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

      - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

   Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar merupakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 1.000.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

   - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing.

b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

   Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi merupakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan perkiraan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000-, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

   - Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Adapun Hasil Analisis Pagu Indikatif Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 206.586.528.000,- Sedangkan pagu indikatif perkiraan maju untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 198.920.141.485,-. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagaimana tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel. T-C.33. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpa Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**206.586.528.000**				**198.920.141.485**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) (%)**		**100,00**	**40.949.790.161,00**				**57.655.599.031**
3	**25**	**01**	**1,01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)**		**12,00**	**390.888.000,00**				**2.317.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	25	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	10,00	390.888.000,00	DAU			2.317.500.000
3	**25**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan**	**Meningkatnya Kinerja ASN (orang)**		**227,00**	**35.870.624.186,00**				**35.083.782.859**
3	25	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	32.870.624.186,00	DAU; PAA		100,00	30.315.892.259
3	25	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tambahan penghasilan ASN (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	3.000.000.000,00	DAU		12,00	4.767.890.600
3	**25**	**01**	**1,06**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)**		**100,00**	**2.500.000,00**			12,00	**533.540.000**
3	25	01	1,06	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (orang)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	5,00	2.500.000,00	DAU		12,00	533.540.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	**25**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)**		**100,00**	**1.656.573.081,00**			12,00	**2.405.450.715**
3	25	01	1,06	01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	45.000.000,00	DAU		12,00	88.078.442
3	25	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	484.573.081,00	OA		12,00	691.942.207
3	25	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	400.000.000,00	DAU		1,00	734.634.566
3	25	01	1,06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	200.000.000,00	DAU		12,00	375.795.500
3	25	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	527.000.000,00	DAU		12,00	515.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
						(bulan)							
3	**25**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)**		**12,00**	**1.979.204.894,00**			12,00	**3.944.524.015**
3	25	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	15.000.000,00	DAU		1,00	17.149.500
3	25	01	1,08	02	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	622.000.000,00	DAU		12,00	318.223.433
3	25	01	1,08	03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	266.204.894,00	DAU		12,00	2.306.389.827
3	25	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	1.076.000.000,00	DAU		12,00	1.302.761.255
3	**25**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah (bulan)**		**12,00**	**1.050.000.000,00**			12,00	**13.370.801.442**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	25	01	1,09	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit) 'tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	12,00	850.000.000,00	DAU		12,00	1.453.701.442
3	25	01	1,09	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00	200.000.000,00	DAU		100,00	11.917.100.000
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau- pulau kecil (KK)**		**300,00**	**2.970.937.400,00**			1,00	**8.904.259.444**
3	**25**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Terkelolanya ruang laut Aceh sampai dengan 12 mil (%)**		**100,00**	**1.539.691.400,00**			2,00	**1.882.693.364**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	25	02	1,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00	150.000.000,00	OA		1,00	1.030.172.722
3	25	02	1,01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhab (lokasi)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,00	1.389.691.400,00	OA		100,00	852.520.642
3	**25**	**02**	**1,03**		**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**	**Meningkatnya keterampilan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**		**300,00**	**1.431.246.000,00**			**100,00**	**7.021.566.080**
3	25	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah petani garam yang dibina, dibantu sarana dan prasarananya (orang)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,00	1.381.246.000,00	DAK; OA		55,00	2.434.347.780

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	25	02	1,03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil (kk)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00	50.000.000,00	OA		128.470,00	4.587.218.300
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**		**231.568,00**	**80.279.254.908,00**			8,00	**98.331.350.261**
3	**25**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**		**231.568,00**	**11.520.000.000,00**			60,00	**10.201.219.795**
3	25	03	1,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00	50.000.000,00	OA		20,00	1.301.869.795
3	25	03	1,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,00	11.320.000.000,00	OA			4.630.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	25	03	1,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00	150.000.000,00	OA			4.269.350.000
3	**25**	**03**	**1,02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**		**231.568,00**	**50.000.000,00**				**843.888.861**
3	25	03	1,02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen produksi perikanan tangkap di PUD (dokumen)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00	50.000.000,00	OA			843.888.861
3	**25**	**03**	**1,06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)**		**231.568,00**	**68.709.254.908,00**				**87.286.241.605**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	25	03	1,06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan sesuai Masterplan (lokasi)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,00	67.459.254.908,00	DAK; OA		2,00	83.640.779.064
3	25	03	1,06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,00	1.250.000.000,00	OA		17.000	3.645.462.541
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**		**138.682,00**	**80.736.545.531,00**			5,00	**23.934.007.000**
3	**25**	**04**	**1,05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**		**138.682,00**	**80.736.545.531,00**				**23.934.007.000**
3	25	04	1,05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Budidaya yang Dibantu (unit)	Kab. Aceh Besar, Kab. Simeulue	2,00	200.000.000,00	OA		50,00	7.165.063.160

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu prasarananya (lokasi)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,00	71.726.054.030,00	DAK; OA		5,00	7.165.063.160
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembudidayaan ikan yang dibantu sarananya (lokasi)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,00	8.810.491.501,00	OA			9.603.880.680
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Luas Kawasan Konservasi Perairan**		**281.100,00**	**350.000.000,00**			10,00	**4.804.501.385**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	**25**	**05**	**1,01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	**Lestarinya Kawasan Konservasi Perairan Aceh**		**281.100,00**	**275.000.000,00**			1,50	**3.137.568.568**
3	25	05	1,01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya patroli pengawasan perikanan tangkap (kali)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,00	200.000.000,00	OA		5,00	1.335.587.469
3	25	05	1,01	02	Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Terbina dan terevaluasinya POKMASWAS (Klp)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,00	75.000.000,00	OA			1.801.981.099
3	**25**	**05**	**1,02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Lestarinya Kawasan Konservasi Perairan Aceh (ha)**		**281.100,00**	**75.000.000,00**			100,00	**1.666.932.817**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	25	05	1,02	01	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah lokasi usaha perikanan tangkap di PUD yang diawasi (lokasi)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,00	75.000.000,00	OA			1.666.932.817
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Meningkatnya nilai ekspor perikanan (USD)**		**4.552.000,00**	**1.300.000.000,00**			700,00	**5.290.424.364**
3	**25**	**06**	**1,02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Meningkatnya usaha pengolahan hasil perikanan (unit)**		**10,00**	**1.000.000.000,00**			25,00	**2.126.347.147**
3	25	06	1,02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Tersedianya layananan, bimbingan dan pemantauan laboratorium PPMHP (bulan)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00	1.000.000.000,00	DAU; OA		20,00	2.126.347.147

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*-3*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	**25**	**06**	**1,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Terpenuhinya bahan baku perikanan di kabupaten/kota (lokasi)**		**23,00**	**300.000.000,00**			40,00	**3.164.077.217**
3	25	06	1,03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah lokasi pendistribusian bahan baku perikanan (lokasi)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,00	300.000.000,00	DAU; OA		150,00	3.164.077.217

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DKP Aceh, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
2. pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
4. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Restrukturisasi armada perikanan tangkap melalui pembangunan dan penyediaan boat fiber bagi nelayan Aceh. merupakan upaya dan solusi Pemerintah Aceh untuk membangun suatu perikanan tangkap yang memadai di Provinsi Aceh yang berbasis pada Blue Economy;
6. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Payau dan operasional melalui Penyediaan Benih ikan bagi Pembudidaya kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
7. Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standart CBIB;
8. Pengembangan kawasan budidaya dengan sistem klaster komoditi unggulan di 23 Kabupaten Kota;
9. Peningkatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, melalui pembinaan UMKM pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta melakukan bimbingan teknis produk olahan ikan bernilai tambah;
10. Peningkatan jaminan mutu hasil perikanan;
11. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan aceh (WPP 571 dan WPP 572).

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Dinas Kelautan dan Perikanan Acehtahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPA Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPA tahun 2022, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPA, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
   - Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.
2. Untuk dapat terlaksananya Renja SKPA tersebut maka sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para *stakeholders* kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, terutama dalam meningkatkan perekonomian daerah.

5.2. Catatan Penting Yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Untuk pelaksanaan RENJA tahun 2022 diharapkan dapat mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) sebagai rencana pembangunan tahunan adalah dokumen awal perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Aceh untuk Tahun 2022 dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 disusun, agar dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2022.

Banda Aceh, Juli 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

ALIMAN, S.Pi, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19750210 200312 1 005

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TAHUN 2022

Provinsi : Aceh
Nama SKPA : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	106,00 103,00
2.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	3. Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	58,64
3.	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	4. Produksi Perikanan (ton) a. Produksi Perikanan Tangkap (ton) b. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 5. Produksi Garam (ton)	370.250,00 231.568 138.682 43.166,52
4.	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	6. Nilai Ekspor Perikanan (US$)	4.552.000,00
5.	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	7. Luas kawasan konservasi perairan (ha)	281.100,00

Banda Aceh, Juli 2021
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

ALIMAN, S.Pi, M.Si
NIP. 19750210 200312 1 005